

Lampiran 1 Surat Undangan

Nomor : B/500.12.14/260/D11

Tanggal : 11 Agustus 2025

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Kepala Biro Organisasi, Setda DIY
2. Paniradya Pati
3. Kepala Dinas Pariwisata DIY
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana*) DIY
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
10. Penghageng Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta
11. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DIY
12. Ketua Forum Komunitas Informasi Masyarakat DIY
13. Kepala Bidang Humas Universitas Ahmad Dahlan
14. Masyarakat Digital Jogja (Masdjo)
15. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY
16. Pranata Hubungan Masyarakat Madya Dinas Kominfo DIY
17. Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Kominfo DIY
18. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY

Hormat kami,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.

Lampiran 2 Surat Undangan
Nomor : B/500.12.14/260/D11
Tanggal : 11 Agustus 2025

Susunan Acara
FGD: Kajian Kebutuhan Kehumasan & Strategi Komunikasi Pemda DIY
Kamis 14 Agustus 2025

NO	WAKTU (WIB)	ACARA	KETERANGAN
1.	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia Penyelenggara
2.	09.00 - 09.05	Pembukaan	MC
3.	09.05 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia Penyelenggara
4.	09.10 - 09.30	Pembukaan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si
5.	09.30 - 10.00	Paparan Pengantar FGD	Tenaga Ahli Dr. Iva Ariani, S.S., M.Hum
5.	10.00 - 12.30	FGD	Terbagi dalam 3 panel
6.	12.30	Penutup	MC

Sebagai bagian dari proses penyusunan kajian kebutuhan kehumasan dan strategi komunikasi publik, perlu dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang menggali kondisi aktual kelembagaan, SDM, serta efektivitas metode komunikasi yang digunakan Pemda DIY. Hasil dari diskusi ini akan menjadi dasar dalam perumusan strategi komunikasi yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik sosial budaya dan perkembangan teknologi informasi di DIY.

B. Tujuan FGD

1. Mengidentifikasi kondisi aktual kelembagaan, SDM, dan infrastruktur kehumasan di lingkungan Pemda DIY.
2. Menganalisis efektivitas kanal dan metode komunikasi yang digunakan Pemda DIY.
3. Menghimpun masukan dari narasumber untuk menyusun strategi komunikasi publik berbasis data dan kearifan lokal.
4. Menyediakan rekomendasi penguatan kelembagaan dan kompetensi kehumasan lintas OPD di Pemda DIY.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025

Pukul : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Ruang Drupadi, The Alana Malioboro Hotel

Jl. Mayjend Sutoyo No. 52, Mantrijeron, Kota Yogyakarta

D. Model Pelaksanaan FGD

FGD akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diawali dengan paparan pemantik diskusi yang akan disampaikan Dr. Iva Ariani, S.S., M.Hum, dan Sesi kedua diisi dengan diskusi panel yang terbagi menjadi tiga tema besar diskusi.

Panel I

Tema: Monitoring Isu dan Perencanaan Strategi Komunikasi Publik

Panel akan membahas bagaimana pola kerja monitoring isu yang dilakukan saat ini di tim Humas DIY, dan juga di masing-masing OPD;

apa saja isu strategis yang sering muncul dan bagaimana respons komunikasi OPD; sejauh mana kolaborasi antar-OPD dalam merumuskan strategi komunikasi, dan bagaimana sebaiknya peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyinergikan komunikasi lintas sektor. Panel juga akan membahas tantangan dalam perencanaan strategi komunikasi yang berbasis data analisis hasil monitoring.

No	Narasumber	Pertanyaan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme kerja monitoring isu saat ini yang dijalankan? 2. Apa saja kanal/sumber yang digunakan untuk memantau opini publik media sosial, media massa, pengaduan masyarakat)? 3. Apakah ada SOP atau protokol untuk merespons isu publik yang berkembang? 4. Bagaimana proses koordinasi dengan OPD lain jika ditemukan isu prioritas atau isu terindikasi krisis? 5. Sejauh mana data monitoring dimanfaatkan untuk menyusun strategi komunikasi publik lintas sektor? 6. Apa tantangan terbesar dalam menyinergikan strategi komunikasi publik antar OPD?
2	Indonesia Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa temuan utama isu-isu publik yang muncul di DIY berdasarkan hasil monitoring terakhir? 2. Apakah terdapat pola khas dalam penyebaran isu (misalnya topik sensitif, aktor utama, wilayah viral)? 3. Bagaimana sebaiknya instansi pemerintah menyusun respons komunikasi berbasis data monitoring?

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apa indikator keberhasilan dari strategi komunikasi berbasis data? 5. Bagaimana peran big data dan kecerdasan buatan dalam mempercepat deteksi isu?
3	Dinas Pariwisata DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa isu strategis di sektor pariwisata DIY yang paling sering muncul di ruang publik? 2. Apakah ada kerja sama atau sinkronisasi narasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola citra daerah? 3. Bagaimana cara memantau persepsi publik terhadap destinasi wisata?
4	BPBD DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses monitoring isu dan informasi saat terjadi bencana atau kedaruratan? 2. Bagaimana strategi komunikasi publik dalam kondisi krisis? Siapa yang menjadi juru bicara? 3. Bagaimana koordinasi informasi darurat antara BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan media? 4. Seberapa penting pengelolaan narasi saat bencana?
5	Paniradya Kaistimewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa isu keistimewaan DIY yang paling sering disalahpahami atau menjadi polemik publik? 2. Bagaimana pendekatan komunikasi publik yang dilakukan untuk menjelaskan isu-isu keistimewaan? 3. Bagaimana Paniradya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD lain untuk membangun narasi kebudayaan dan keistimewaan? 4. Apakah ada strategi komunikasi khusus

		berbasis nilai lokal?
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja isu strategis yang sering muncul di sektor pendidikan dan bagaimana penanganannya secara komunikasi? 2. Bagaimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyampaikan informasi kepada publik dalam isu sensitif (seperti PPDB, kekerasan di sekolah, dll)? 3. Apakah Dinas Komunikasi dan Informatika dilibatkan dalam pengelolaan isu-isu ini?
7	Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa isu-isu yang berkaitan dengan Kraton yang sering muncul di media atau media sosial? 2. Keraton dan Pemda DIY tidak bisa dipisahkan satu sama lain menjadi entitas budaya dan politik. Bagaimana alur koordinasi komunikasi dan membangun narasi kebudayaan dan keistimewaan selama ini dilakukan kedua pihak? 3. Apakah Keraton memiliki kanal atau strategi tersendiri dalam menyampaikan klarifikasi isu? 4. Bagaimana pandangan Kraton terkait integrasi narasi budaya dalam komunikasi publik pemda DIY?
8	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada pengalaman menghadapi misinformasi atau kontroversi budaya di publik? 2. Apa isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus dan berpotensi menjadi krisis?

9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (<i>Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa isu pertanahan dan tata ruang yang paling rentan menimbulkan kontroversi atau kesalahpahaman publik sehubungan dengan status keistimewaan pada tata ruang dan pertanahan di DIY? 2. Apa tantangan utama dalam menyampaikan informasi teknis kepada masyarakat awam? 3. Seberapa sering Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dilibatkan dalam merancang narasi untuk kebijakan tata ruang?
---	--	--

Panel II

Tema: Konten, Diseminasi, dan Media Relations

Panel akan membahas bagaimana kualitas dan keberagaman konten komunikasi publik Pemda saat ini, dan sejauh mana narasi lokal dan budaya diangkat dalam konten publik, apa saja tantangan dalam sinkronisasi narasi antarkanal komunikasi (media sosial, web, media konvensional), dan bagaimana hubungan kerja sama antara OPD dengan media massa, apa saja ekspektasi media massa terhadap institusi pemerintah dalam hal keterbukaan dan kecepatan informasi. Panel juga akan mendalami peran homeless media dalam diseminasi informasi lokal dan adakah model partisipasi yang bisa dilakukan dalam mencegah disinformasi di masyarakat.

No	Narasumber	Pertanyaan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penulisan siaran pers? Berapa kali siaran pers dikeluarkan dalam satu bulan? Apa hambatan dalam penulisan siaran pers? 2. Bagaimana proses penulisan siaran pers? Apakah melalui penyuntingan dan persetujuan OPD/pejabat terkait? 3. Bagaimana proses penyelenggaraan press

		<p>briefing (konferensi pers) dan media gathering?</p> <p>4. Apakah sudah ada grup online yang mewadahi wartawan di DIY? Apa saja grupnya, apakah Whatsapp, Telegram, atau media lain?</p> <p>5. Bagaimana proses menerima pertanyaan dari wartawan? Apakah ada personel yang khusus menangani pertanyaan dari wartawan? Apa hambatannya</p>
2	Media Massa	<p>1. Apa penilaian media terhadap siaran pers, konferensi pers, dan media gathering yang dilakukan Pemda DIY? Apa evaluasi dari media massa?</p> <p>2. Apa saja yang dibutuhkan media massa dari komunikasi publik yang dilakukan Pemda DIY? Apakah kecepatan? Apakah kemudahan mengakses narasumber? Apakah kelengkapan informasi?</p> <p>3. Apakah Pemda DIY sering menggunakan hak jawab maupun hak koreksi?</p>
3	Homeless Media	<p>1. Bagaimana hubungan homeless media dengan Pemda DIY? Apakah homeless media mudah mengakses informasi dari Pemda DIY?</p> <p>2. Apa saja yang dibutuhkan homeless media dari komunikasi publik yang dilakukan Pemda DIY? Apakah kecepatan? Apakah kemudahan mengakses narasumber? Apakah kelengkapan informasi?</p> <p>3. Apakah sering ada koreksi dari Pemda DIY berkaitan dengan informasi yang dimuat</p>

		oleh homeless media?
4	Praktisi Komunikasi (UAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengalaman UAD dalam melakukan komunikasi publik dan menjalin hubungan dengan media massa dan homeless media? Apakah UAD memiliki prosedur operasional dalam tata kelola dengan media? 2. Apa saja hambatan dalam berhubungan dengan media, baik media massa maupun homeless media? 3. Bagaimana tata kelola penulisan siaran pers, konferensi pers, maupun media gathering di UAD?

Panel III

Tema: Partisipasi KIM, Dukungan SDM, dan Tata Kelola Kehumasan

Panel akan membahas sejauh mana peran KIM dalam penyebaran informasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat, dan bagaimana pola koordinasi KIM dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY; Panel juga akan mendalami bagaimana kondisi aktual SDM kehumasan di OPD, baik jumlah personel, kompetensi, dan beban kerja; Sudahkan tersedia sistem pengelolaan dan pengembangan SDM kehumasan lintas OPD. Panel juga menggali apa saja tantangan utama dalam aspek kelembagaan dan tata kelola kehumasan saat ini. Terakhir, panel diharapkan bisa menghasilkan kumpulan rekomendasi untuk penguatan SDM, dan kelembagaan/tata kelola.

No	Narasumber	Pertanyaan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	<p>Bagaimana kondisi aktual SDM kehumasan di OPD saat ini, baik jumlah personel, kompetensi, dan beban kerja?</p> <p>Apakah kondisi SDM kehumasan saat ini sudah</p>

		<p>ideal atau masih perlu dikembangkan?</p> <p>Apa tantangan yang dihadapi SDM kehumasan saat ini?</p> <p>Apakah sudah ada pranata humas di setiap OPD? serta bagaimana perannya selama ini?</p> <p>Sudahkan tersedia sistem pengelolaan dan pengembangan SDM kehumasan lintas OPD?</p>
2	Perwakilan KIM	<p>Sejauh mana peran KIM dalam penyebaran informasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat selama ini?</p> <p>Bagaimana mekanisme penyebaran serta bagaimana input atau aspirasi masyarakat disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika DIY?</p> <p>Apa tantangan yang dihadapi KIM selama ini dalam penyebaran informasi maupun dalam menyampaikan masukan ke pemerintah?</p> <p>Bagaimana pola koordinasi antara KIM dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selama ini?</p> <p>Apa sarana yang tepat yang perlu dirancang untuk mengaktifkan penyebaran informasi maupun penyampaian aspirasi?</p>
3	Biro Organisasi	<p>Terkait instruksi Sekda mengenai rekrutmen pranata humas di setiap OPD, apakah itu memungkinkan? bagaimana celah regulasi dan tata kelola kelembagaannya?</p> <p>Terkait kebutuhan ideal SDM kehumasan apakah memungkinkan untuk dibentuk? apa tantangannya?</p>

		Apa rekomendasi terkait pengelolaan kelembagaan dan tata kelola kehumasan saat ini?
4	Bapperida DIY	<p>Apa rekomendasi untuk penguatan SDM dan tata kelola kelembagaan kehumasan?</p> <p>Terkait dengan instruksi adanya pranata humas di setiap OPD, apakah memungkinkan secara regulasi dan anggaran?</p> <p>Apa rekomendasi terkait pengembangan kapasitas SDM kehumasan?</p> <p>Bagaimana sebaiknya pola koordinasi antara KIM dan Pemerintah?</p>

E. Hasil yang Diharapkan

1. Terpetakannya kondisi aktual kelembagaan dan SDM kehumasan Pemda DIY.
2. Tersusunnya daftar isu strategis komunikasi dan efektivitas kanal komunikasi.
3. Terkumpulnya informasi yang dibutuhkan dari berbagai narasumber untuk perancangan strategi komunikasi berbasis data dan budaya.
4. Rekomendasi perbaikan kelembagaan dan tata kelola kehumasan Pemda DIY.

F. Penutup

FGD ini diharapkan menjadi jembatan strategis antara analisis teknokratik dan realitas lapangan, guna mewujudkan komunikasi publik Pemda DIY yang transparan, inklusif, dan berdampak.